

Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Watu Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai

Rupertus Suwandi Ogot¹⁾, Sapto Pramono²⁾, Widyawati³⁾

^{1) 2) 3)} Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: rupertussuwandiogot@gmail.com

ABSTRAK

Kesenjangan antara penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan kriteria target menyoroti tantangan signifikan dalam pelaksanaan program tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki pelaksanaan BPNT di Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai. Pendekatan penelitian yang diterapkan adalah studi kasus kualitatif, memungkinkan peneliti menjelajahi secara menyeluruh konteks, proses, dan dampak program. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat penerima manfaat terkait implementasi BPNT. Analisis data menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program, seperti kualitas data, mekanisme penyaluran, dan partisipasi masyarakat. Secara keseluruhan, implementasi BPNT di Kelurahan Watu menghadapi tantangan dalam mencapai sasaran secara efektif. Rekomendasi diberikan untuk meningkatkan koordinasi antar instansi terkait, memperbaiki validasi data, dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kinerja dan dampak program BPNT.

Kata Kunci: Efektivitas, Implementasi Program, Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Abstract

The gap between Non-Cash Food Assistance (BPNT) recipients and the target criteria highlights significant challenges in the implementation of the program. The purpose of this study was to investigate the implementation of BPNT in Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai. The research approach applied was a qualitative case study, allowing researchers to thoroughly explore the context, process and impact of the program. Data was collected through observation, interviews, and documentation. The results showed differences in perceptions between the government and beneficiary communities regarding the implementation of BPNT. Data analysis highlighted factors that influence the success of the program, such as data quality, distribution mechanisms, and community participation. Overall, the implementation of BPNT in Kelurahan Watu faces challenges in effectively reaching the target. Recommendations are given to improve coordination between relevant agencies, improve data validation, and increase community participation. This research is expected to make a positive contribution in improving the performance and impact of the BPNT program.

Keywords: Effectiveness, Program Implementation, Non-Cash Food Assistance Program (BPNT)

A. LATAR BELAKANG

Dalam berbagai negara di seluruh dunia, kemiskinan telah menjadi tantangan serius yang mempengaruhi kehidupan jutaan orang, terutama di negara-negara yang masih dalam tahap pembangunan. Kemiskinan tidak hanya mencakup kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi juga melibatkan akses

terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi (Pratama, 2015). Di Indonesia, masalah kemiskinan telah menjadi perhatian utama pemerintah sejak lama, terutama karena negara ini memiliki populasi yang besar, mencapai lebih dari 273 juta jiwa, dengan sebagian besar penduduknya tersebar di daerah-daerah dengan kondisi sosial ekonomi yang beragam.

Strategi utama dalam mengatasi kemiskinan melibatkan perlindungan terhadap keluarga dan kelompok masyarakat miskin dengan memenuhi kebutuhan mereka serta memberikan pelatihan agar mereka memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menghindari kemiskinan baru. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program, seperti Undang-Undang Penanganan Fakir Miskin, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Maryam & Candra, 2022).

Peran pemerintah dalam mengatasi kemiskinan sangat signifikan, karena kebijakan dan regulasi yang diterapkan membentuk dasar untuk pembangunan. Salah satu inisiatif awal adalah pembentukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang melibatkan unsur pemerintah, masyarakat, sektor bisnis, dan stakeholder lainnya. Program-program diluncurkan dengan fokus pada meningkatkan sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan mengurangi beban hidup masyarakat (Vitara Agatha & Uliansyah, 2021).

Salah satu program yang diimplementasikan adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). BPNT merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk mendorong keuangan inklusif dan meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta ketepatan penyaluran bantuan sosial. Untuk mendukung implementasi program ini, Presiden Republik Indonesia menetapkan PERPRES RI Nomor 63 Tahun 2017. Program BPNT telah mendapat apresiasi yang tinggi dari pemerintah karena berhasil mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan memenuhi sebagian kebutuhan pangan mereka, menyediakan gizi seimbang, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

Awalnya, Program Beras Sejahtera (Rastra) digantikan oleh Program BPNT karena Rastra menghadapi sejumlah masalah kompleks dalam pelaksanaannya. Menurut Pusat Studi

Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada (2017), beberapa masalah tersebut antara lain adalah tingginya tingkat *error exclusion* dan *inclusion*. *Error exclusion* menunjukkan bahwa rumah tangga yang seharusnya memenuhi syarat untuk menerima Rastra tidak terdaftar sebagai penerima, sehingga kehilangan bantuan sosial tersebut. Di sisi lain, *error inclusion* menunjukkan bahwa rumah tangga yang seharusnya tidak memenuhi syarat untuk menerima Rastra justru menerima bantuan tersebut.

Penggantian Program Rastra dengan Program BPNT menjadi langkah strategis karena BPNT memberikan solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang teridentifikasi dalam pelaksanaan Rastra. Dengan demikian, BPNT tidak hanya memberikan bantuan pangan kepada keluarga yang membutuhkan, tetapi juga meningkatkan akurasi dan efektivitas penyaluran bantuan sosial secara keseluruhan. Program ini memberikan bantuan pangan non tunai kepada keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulan melalui kartu elektronik, yang memungkinkan mereka untuk membeli berbagai kebutuhan pangan. BPNT bertujuan untuk memberikan nutrisi seimbang kepada KPM dengan tepat sasaran dan tepat waktu, serta mengurangi beban pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan pangan (Fadlurrohim et al., 2020).

Meskipun demikian, implementasi program BPNT masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Salah satunya adalah masalah *error exclusion* dan *inclusion* yang tinggi, di mana beberapa rumah tangga yang seharusnya memenuhi syarat untuk menerima bantuan tidak terdaftar sebagai penerima atau sebaliknya. Selain itu, ada masalah dengan indikator jumlah yang signifikan, di mana beberapa rumah tangga hanya menerima jumlah bantuan yang jauh di bawah yang seharusnya.

Di Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), merupakan salah satu daerah yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Kabupaten Manggarai sendiri terdiri dari 12 kecamatan, 145 desa, dan 20 kelurahan. Salah satu kelurahan di Kabupaten Manggarai yang

menjadi lokasi penyaluran BPNT adalah Kelurahan Watu, yang terletak di Kecamatan Langke Rembong.

Data jumlah penerima BPNT di Kecamatan Langke Rembong pada tahun 2023 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 1.1. Jumlah Penerima BPNT di Kecamatan Langke Rembong Tahun 2023

No.	Kelurahan	Jumlah Penerima BPNT (KPM)	Jumlah KK
1	Bangka Leda	197	610
2	Bangka Nekang	50	569
3	Carep	22	1188
4	Compang Carep	30	209
5	Compang Tuke	114	469
6	Golo Dukal	304	1215
7	Karot	254	1739
8	Laci Carep	72	185
9	Lawir	60	568
11	Pau	279	2950
12	Pitak	223	1656
13	Poco Mal	46	401
14	Rowang	26	209
15	Satar Tacik	138	1149
16	Tadong	66	314
17	Tenda	127	2252
18	Wali	418	1758
19	Waso	185	1177
20	Watu	174	2177
Total		3.113	20.795

Sumber: Diolah penulis, 2023

Namun, implementasi program BPNT di Kelurahan Watu masih menghadapi beberapa masalah, menunjukkan bahwa belum seluruhnya berjalan secara efektif. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Watu Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai”.

B. LANDASAN TEORITIS

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik, menurut William Dunn (2003:132), merujuk pada pola

ketergantungan yang kompleks dari pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Leo Agustino (2008:7) melihat kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah untuk mengatasi hambatan dan memanfaatkan peluang dalam mencapai tujuan tertentu. James E. Anderson, seperti yang dikutip dalam Islamy (2009:17), mendeskripsikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang memiliki tujuan spesifik yang diimplementasikan oleh pelaku atau kelompok pelaku guna menyelesaikan masalah tertentu.

Definisi kebijakan publik oleh Carl I. Friedrich, sebagaimana dijelaskan oleh Nugroho (2008:53), menggambarkan kebijakan sebagai rangkaian tindakan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu konteks tertentu, dengan mempertimbangkan ancaman dan peluang yang ada. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan potensi dan mengatasi hambatan untuk mencapai tujuan tertentu. Winarmo (2002:16) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah arah tindakan yang ditetapkan oleh aktor atau sekelompok aktor untuk mengatasi masalah atau persoalan tertentu.

Definisi ini menggambarkan kebijakan publik sebagai rangkaian tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh aktor-aktor publik untuk mengatasi masalah dalam masyarakat dengan memilih alternatif terbaik demi mencapai tujuan pemecahan masalah tersebut. Kebijakan publik diarahkan oleh pemerintah kepada masyarakat dengan tujuan tertentu untuk kepentingan publik.

Proses pembuatan kebijakan publik menurut William Dunn melibatkan beberapa tahap, yakni penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Pada tahap penyusunan agenda, masalah-masalah yang akan dijadikan fokus kebijakan ditempatkan pada agenda publik melalui

perdebatan definisi, eksplorasi, dan evaluasi. Tahap formulasi kebijakan melibatkan merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut. Adopsi kebijakan terjadi melalui dukungan mayoritas legislatif atau konsensus di antara direktur lembaga. Implementasi kebijakan melibatkan penerapan kebijakan oleh unit-unit administrasi yang menggerakkan sumber daya finansial dan manusia. Terakhir, tahap penilaian kebijakan melibatkan evaluasi terhadap pematuhan terhadap persyaratan undang-undang dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Evaluasi kebijakan publik merupakan proses sistematis untuk menentukan nilai, tujuan, efektivitas, atau kesesuaian suatu hal berdasarkan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi program, sebagai bagian dari evaluasi kebijakan publik, dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi melalui berbagai metode, seperti mengkaji dokumen, wawancara dengan informan, dan observasi langsung. Tujuan dari evaluasi ini adalah memberikan masukan untuk perencanaan program, kelanjutan atau penghentian program, modifikasi program, mendapatkan informasi tentang faktor pendukung dan penghambat program, serta memberikan masukan untuk motivasi dan pembinaan program. Dengan demikian, evaluasi diharapkan dapat membantu dalam menemukan masalah dan menemukan solusi untuk perbaikan program.

2. Efektivitas Program

Efektivitas program merujuk pada tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini melibatkan kesesuaian antara pelaksanaan tugas dan sasaran yang dituju. Menurut beberapa ahli, efektivitas juga terkait dengan pencapaian tujuan bersama daripada pencapaian tujuan individu, serta berkaitan dengan bagaimana suatu organisasi mencapai sasaran atau melaksanakan tugas utamanya.

Untuk mengukur efektivitas program, dapat digunakan indikator-indikator seperti

ketepatan sasaran, yaitu sejauh mana pelanggan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Sosialisasi program juga menjadi indikator, yang mengukur kemampuan penyelenggara program dalam menyampaikan informasi tentang pelaksanaan program kepada masyarakat umum dan sasaran program secara khusus. Selanjutnya, tujuan program dievaluasi untuk menilai sejauh mana hasil pelaksanaan program sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemantauan program juga penting, karena merupakan kegiatan yang dilakukan setelah program berakhir untuk menunjukkan perhatian terhadap pelanggan.

Pendapat pelanggan juga dapat dijadikan indikator efektivitas program, terutama melalui reaksi mereka terhadap program yang diikuti. Pertanyaan tentang manfaat dan kepuasan pelanggan dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur reaksi pelanggan terhadap program. Selain itu, efektivitas program BPNT dalam mengurangi kemiskinan di Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, dapat dijadikan ukuran efisiensi program.

3. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah inisiatif pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memberikan bantuan sosial pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara berkala. Program ini diluncurkan sebagai bagian dari reformasi Program Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tahun 2017, sebagai respons terhadap arahan Presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan efektivitas, ketepatan sasaran, dan inklusi keuangan dalam penyaluran bantuan sosial. Artikel ini akan menguraikan lebih lanjut tentang konsep BPNT, proses pelaksanaannya, tujuan, manfaat, serta dasar hukum dan indikator efektivitasnya.

BPNT merupakan bentuk bantuan sosial pangan yang diberikan kepada KPM setiap bulan secara berkala. Salah satu fitur utama dari program ini adalah penyalurannya dalam bentuk non-tunai melalui mekanisme akun elektronik yang khusus digunakan untuk pembelian bahan pangan di pedagang bahan pangan atau e-warong yang telah bekerja sama dengan bank. Dengan menggunakan akun elektronik ini, KPM dapat memperoleh akses ke berbagai jenis bahan pangan sesuai kebutuhan mereka. Implementasi BPNT dimulai secara bertahap sejak tahun 2017 di beberapa daerah terpilih yang memiliki akses dan fasilitas yang memadai.

Program BPNT didukung oleh beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah, antara lain:

- a) UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- b) UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Kelompok Fakir Miskin.
- c) UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- d) Perpres RI Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.
- e) Perda Kabupaten Manggarai Barat No. 4 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Program BPNT melibatkan serangkaian tahapan yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, bank, e-warong, dan tentu saja KPM. Tahapan tersebut mencakup:

- a) Persiapan

Tahap awal kegiatan dimulai dengan persiapan setelah Kementerian Sosial menetapkan Bank Penyalur BPNT. Koordinasi dilakukan di tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memastikan pelaksanaan program berjalan lancar.

- b) Sosialisasi dan Edukasi

Tahap ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat,

terutama KPM, tentang tujuan BPNT, cara memanfaatkannya, dan prosedur pengaduan yang tersedia. Sosialisasi juga ditujukan kepada e-warong agar mereka dapat memberikan layanan yang optimal.

- c) Registrasi atau Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

Bank penyalur melakukan registrasi atau pencatatan mengenai rekening secara kolektif berdasarkan data KPM yang telah diberikan dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Distribusi KKS dilakukan kepada KPM yang telah memiliki rekening, dan proses ini melibatkan pemerintah daerah dan pendamping sosial.

- d) Penyaluran BPNT

KPM mengunjungi e-warong dengan membawa KKS dan kartu identitas diri. Mereka melakukan pengecekan saldo bantuan yang tertera pada KKS menggunakan mesin *Electronic Data Capture* (EDC) sebelum melakukan pembelian bahan pangan.

Tujuan utama dari Program BPNT adalah untuk meringankan beban pengeluaran KPM dengan menyediakan bantuan pangan secara berkala. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan efisiensi dalam penyaluran bantuan sosial. Manfaat dari BPNT meliputi peningkatan ketahanan pangan di kalangan KPM, memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, dan meningkatkan efisiensi dalam penyaluran bantuan sosial.

Efektivitas Program BPNT dapat diukur melalui berbagai indikator, antara lain:

- a) Ketepatan sasaran: Sejauh mana program ini menysasar KPM yang benar-benar membutuhkan bantuan.
- b) Sosialisasi program: Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang program melalui sosialisasi yang efektif.
- c) Tujuan program: Sejauh mana program mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti peningkatan ketahanan pangan di kalangan KPM.

- d) Pemantauan program: Kegiatan pemantauan pasca-implementasi program untuk menilai keberhasilan dan menemukan area perbaikan.

C. METODE

Metodologi penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah studi kasus, yang merupakan pendekatan kualitatif yang mengeksplorasi secara mendalam suatu program, peristiwa, proses, atau kegiatan dengan fokus pada satu atau lebih subjek. Fokus penelitian ditetapkan untuk mempersempit cakupan masalah dan menyoroti inti permasalahan yang masih bersifat umum, dengan tujuan memahami secara mendalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai.

Lokasi penelitian dipilih dengan cermat, yaitu di Kantor Desa atau Kelurahan Watu, dengan pertimbangan bahwa data awal menunjukkan ketidaksesuaian antara penerima BPNT dengan kriteria target.

Pemilihan informan penelitian dilakukan melalui metode *purposive sampling*, di mana informan dipilih berdasarkan karakteristik tertentu yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian. Informan terdiri dari pihak pemerintah yang bertanggung jawab atas penyaluran BPNT di Kelurahan Watu, masyarakat penerima manfaat (KPM) BPNT, serta masyarakat yang menerima BPNT tetapi bukan KPM.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati langsung kondisi rumah tangga penerima BPNT yang layak dan tidak layak, sementara wawancara digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam dari informan. Dokumentasi juga dilakukan untuk mencatat kegiatan penelitian secara visual.

Analisis data dilakukan secara induktif, dimulai dengan reduksi data untuk mengidentifikasi informasi kunci dan menghapus yang tidak relevan, lalu dilanjutkan dengan penyajian data dalam bentuk naratif dan

penarikan kesimpulan. Kesimpulan diambil berdasarkan analisis data yang telah dikumpulkan, dengan menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai

a) Perubahan Nyata

Mayoritas Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melaporkan adanya perubahan positif dalam kondisi sosial dan ekonomi mereka setelah menerima bantuan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Mereka merasa terbantu dalam mengurangi beban pengeluaran sehari-hari dan meningkatkan akses terhadap pangan, sehingga memungkinkan mereka untuk mengalokasikan sumber daya mereka ke area lain yang lebih produktif. Dampak positif ini memberikan harapan bagi KPM untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan mereka secara keseluruhan.

b) Pemahaman Program

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa mayoritas KPM memahami mekanisme dan tujuan dari program BPNT. Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak terkait telah membantu dalam memperjelas prosedur dan manfaat program ini bagi mereka yang memenuhi syarat. Namun, masih ada beberapa KPM yang kurang memahami proses pengambilan atau pembelian di tempat yang ditentukan. Ini menandakan perlunya peningkatan dalam sosialisasi dan edukasi terkait program ini, mungkin melalui pendekatan yang lebih intensif atau menggunakan metode komunikasi yang lebih mudah dipahami oleh seluruh anggota masyarakat.

c) Tepat Sasaran

Terjadi ketidaksesuaian antara sasaran yang seharusnya menerima

bantuan dengan kenyataannya. Beberapa keluarga miskin tidak terdaftar sebagai penerima manfaat, sementara beberapa keluarga yang seharusnya tidak memenuhi kriteria penerima juga menerima bantuan. Hal ini menunjukkan kekurangan dalam proses verifikasi dan validasi data yang digunakan untuk menentukan penerima manfaat. Perbaikan dalam sistem administrasi dan proses verifikasi data diperlukan untuk memastikan bahwa bantuan disalurkan kepada mereka yang membutuhkan secara tepat.

d) Tepat Waktu

Banyak KPM mengeluhkan tentang keterlambatan dalam pencairan dana bantuan, yang kemudian mempengaruhi ketersediaan dan aksesibilitas mereka terhadap kebutuhan pangan. Penyaluran bantuan yang tidak tepat waktu dapat mengganggu stabilitas keuangan keluarga miskin dan menimbulkan ketidakpastian. Ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam manajemen logistik dan proses distribusi untuk memastikan bahwa bantuan disalurkan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, serta untuk mengurangi kemungkinan terjadinya keterlambatan yang tidak perlu.

Kesimpulannya, program BPNT telah membawa perubahan positif bagi sebagian besar KPM dalam hal mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan akses terhadap pangan. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti masalah dalam pemahaman program, ketepatan sasaran, dan ketepatan waktu dalam penyaluran bantuan. Diperlukan upaya lebih lanjut dari pemerintah dan pihak terkait untuk meningkatkan efektivitas dan dampak positif program ini, termasuk melalui peningkatan dalam sosialisasi, peningkatan akurasi data, dan perbaikan dalam manajemen distribusi bantuan. Dengan demikian, program ini dapat terus menjadi instrumen yang efektif dalam mengatasi

masalah ketimpangan sosial dan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2. Analisis Penelitian

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi keluarga yang berada dalam kondisi kurang mampu atau miskin. Meskipun program ini memiliki tujuan yang mulia, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa masalah yang perlu diperhatikan dan diatasi untuk meningkatkan efektivitasnya. Dalam pembahasan ini, akan dibahas penyebab masalah yang dihadapi oleh Program BPNT, solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, dan harapan di masa depan terkait dengan pelaksanaan program ini.

Salah satu penyebab utama masalah dalam pelaksanaan Program BPNT adalah ketidaksesuaian antara sasaran penerima bantuan dengan kenyataannya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya akurasi dalam verifikasi dan validasi data yang digunakan untuk menentukan penerima manfaat. Proses verifikasi dan validasi data yang tidak dilakukan secara cermat dan tepat waktu dapat mengakibatkan keluarga yang seharusnya memenuhi kriteria penerima tidak terdaftar, sementara keluarga yang seharusnya tidak memenuhi kriteria tersebut malah menerima bantuan.

Selain itu, keterlambatan dalam penyaluran bantuan juga menjadi masalah yang sering terjadi dalam pelaksanaan Program BPNT. Keterlambatan ini bisa disebabkan oleh ketidakjelasan dalam jadwal penyaluran dan kendala administratif lainnya. Ketidakpastian terkait waktu penyaluran bantuan dapat mengganggu stabilitas keuangan keluarga miskin dan menimbulkan ketidakpastian.

Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu dilakukan beberapa langkah perbaikan dalam proses administratif dan pelaksanaan

program. Pertama-tama, pemerintah harus memastikan bahwa verifikasi dan validasi data dilakukan secara cermat dan tepat waktu. Diperlukan kerjasama antara berbagai pihak terkait, seperti Dinas Sosial, kelurahan, dan RT/RW, untuk melakukan verifikasi data dengan akurat agar bantuan dapat diberikan kepada mereka yang membutuhkan.

Selanjutnya, perlu peningkatan dalam manajemen logistik dan distribusi bantuan untuk memastikan bahwa penyaluran dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Informasi terkait jadwal penyaluran harus disosialisasikan dengan jelas kepada masyarakat penerima manfaat agar mereka dapat mempersiapkan diri dengan baik. Penggunaan teknologi informasi juga dapat membantu dalam memantau dan mengelola distribusi bantuan dengan lebih efisien.

Dengan melakukan perbaikan dalam pelaksanaan program, diharapkan Program BPNT dapat terus menjadi instrumen yang efektif dalam mengatasi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program perlu dilakukan untuk mengidentifikasi potensi perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan. Pemerintah juga perlu terus berkomitmen untuk meningkatkan aksesibilitas dan akurasi program ini guna memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Dengan demikian, diharapkan Program BPNT dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat Indonesia.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Watu, Kabupaten Manggarai, membawa perubahan positif dengan mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan akses pangan. Meskipun

demikian, masih ada tantangan seperti ketidaksesuaian sasaran penerima dan keterlambatan penyaluran bantuan. Untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan perbaikan dalam verifikasi data, manajemen distribusi, dan sosialisasi program. Dengan langkah-langkah perbaikan yang tepat, BPNT dapat terus menjadi instrumen yang efektif dalam mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2. Rekomendasi

Rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Watu, Kabupaten Manggarai, termasuk peningkatan verifikasi data, manajemen distribusi yang lebih efisien, sosialisasi program yang intensif, dan pengembangan monitoring dan evaluasi. Harapannya, dengan implementasi rekomendasi ini, BPNT dapat lebih efektif dalam mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi di wilayah tersebut.

REFERENSI

- Aspar, & Syakhrudin. (2020). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Bontoduri Kecamatan Tamalate Kota Makassar. *Jurnal Washiyah*, 1(2), 305–325.
- Fadlurrohim, I., Nulhaqim, S. A., & Sulastri, S. (2020). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Studi Kasus Di Kota Cimahi). *Share: Social Work Journal*, 9(2), 122–138.
- Ferezegia, D. (2018). Analisis Tingkat Kemiskinan. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 1(1), 1–6.
- Maryam, S., & Candra, E. A. (2022). Evaluasi Program Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) Pada Kelompok Masyarakat Miskin di Era Pandemi Covid 19 di Desa Pulung Rejo Kecamatan Rimbo Ilir. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(3), 10312–10322.

- Pratama, Y. C. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia. *Esensi*, 4(2), 45–53.
- Puspita, K. S. R., Ratnawati, S., & Nurany, F. (2023). Efektivitas Pelayanan Publik Dalam Program Pemberian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Gilang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 3(4), 299–310.
- Rahman, S., Rachman, E., & Gobel, L. Van. (2024). Efektivitas Proses Penyaluran Program BPNT di Desa Datahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo. *Journal of Public Management and Public Policy*, 4(6), 1387–1395.
- Vitara, A. S., & Uliansyah, B. A. A. (2021). Pengaruh Desentralisasi Fiskal dalam Pengentasan Kemiskinan dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Mediasi di Provinsi Papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 1(3), 156–176.

